

Kertas Kebijakan
(RIA Statement)

Upaya Peningkatan Produktifitas Kakao di Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah



FORDFOUNDATION



Kertas Kebijakan
(RIA Statement)

Upaya Peningkatan Produktifitas Kakao di Kabupaten Donggala-Sulawesi Tengah

TIM PENELITI KPPOD

Principal Investigator Robert Endi Jaweng

Koordinator Peneliti Tities Eka Agustine

Peneliti M. Yudha Prawira

Aisyah Nurrul Jannah



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah



Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Tim Peneliti | i |
| Daftar Isi | iii |
| Daftar Gambar dan Tabel | v |
| | |
| I. Latar Belakang | 1 |
| II. Perumusan Masalah | 2 |
| III. Identifikasi Tujuan | 4 |
| IV. Alternatif Tindakan | 6 |
| IV.1. Opsi 1: Do Nothing | 7 |
| IV.2. Opsi 2: Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao | 7 |
| IV.3. Opsi 3: Pembentukan Forum Kerjasama dan Koordinasi antar <i>Stakeholders</i> Rantai Nilai Kakao | 8 |
| IV.4. Opsi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao | 9 |
| V. Analisis Biaya dan Manfaat | 10 |
| V.1. Opsi 1: Do Nothing | 10 |
| V.2. Opsi 2: Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao | 10 |
| V.3. Opsi 3: Pembentukan Forum Kerjasama dan Koordinasi antar <i>Stakeholders</i> Rantai Nilai Kakao | 16 |
| V.4. Opsi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao | 20 |
| V.5. Alternatif Terpilih: Opsi 2 | 23 |
| VI. Strategi Implementasi | 24 |
| VII. Konsultasi <i>Stakeholders</i> | 27 |
| VIII. Lampiran | 29 |



Daftar Gambar dan Tabel

| | | |
|-----------|--|----|
| Gambar 1. | Analisis Pohon Masalah | 4 |
| Tabel 1. | Identifikasi Tujuan | 5 |
| Tabel 2. | Indikator dan Baseline Tindakan “Do Nothing” | 11 |
| Tabel 3. | Analisis Resiko Tindakan “Do Nothing” | 11 |
| Tabel 4. | Analisis Manfaat Opsi 2 | 12 |
| Tabel 5. | Analisis Biaya Opsi 2 | 14 |
| Tabel 6. | Analisis Manfaat Opsi 3 | 17 |
| Tabel 7. | Analisis Biaya Opsi 3 | 18 |
| Tabel 8. | Analisis Manfaat Opsi 4 | 20 |
| Tabel 9. | Analisis Biaya Opsi 4 | 22 |
| Tabel 10. | Metode Konsultasi Publik | 27 |



I. Latar Belakang

Melalui Keputusan Menteri Pertanian dan Perkebunan (Kepmentan) No. 46/Kpts/PD.300/2015, Pemerintah telah menetapkan beberapa daerah yang menjadi pusat kawasan perkebunan kakao, termasuk diantaranya adalah Kabupaten Donggala. Di daerah ini, kakao bukan lagi sebagai komoditas yang asing bagi masyarakat. Bahkan, sebagaimana penuturan petani setempat yang ditemui dalam kesempatan studi lapangan¹⁾, kakao Donggala pernah mendulang masa keemasan justru ketika perekonomian Indonesia mengalami krisis serius sepanjang 1997-1998 silam.

Sebagian besar perkebunan kakao Donggala merupakan perkebunan rakyat yang menyerap tenaga kerja cukup banyak yakni sebesar 20.273 (KK) dengan estimasi pendapatan yang diterima petani untuk setiap rumah tangga usaha di sektor kakao selama satu tahun sebanyak Rp 30.110.590. Besarnya jumlah tenaga kerja dan juga nominal pendapatan yang banyak, tentu akan membawa efek berganda (*multiplier effect*) dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Selain itu, merujuk hasil penelitian rantai nilai kakao yang dilakukan KPPOD²⁾, terdapat banyak pihak yang berkepentingan dan memiliki kontribusi peran di dalamnya. Berbagai pihak dimaksud, antara lain, para pedagang desa, pengepul hingga eksportir

memperlihatkan bahwa komoditas ini menjadi sumber penghidupan masyarakat, identifikasi aktor yang terlibat dalam rantai nilai dapat dilihat pada lampiran 1. Lebih jauh lagi, kakao juga cukup diminati oleh pasar internasional yang ditunjukkan dengan tidak pernah mengalami penurunan permintaan yang drastis. Selain manfaat bagi perekonomian daerah, komoditas kakao juga memiliki peran bagi perekonomian nasional berupa, antara lain, sumbangan devisa sebesar USD 1,053 Milyar dari ekspor biji kakao dan produk olahannya³⁾.

Namun sayangnya, kondisi kakao yang sebelumnya menjadi soko guru kehidupan sebagian masyarakat dan pernah berada pada puncak kejayaan (bahkan saat negeri ini dilanda krisis sebagaimana disebut di atas), kini mulai memperlihatkan kondisi anti klimaks. Dalam beberapa tahun belakangan, tingkat produksi kakao di Kabupaten Donggala mengalami penurunan yang cukup signifikan. Merujuk hasil sensus pertanian pada tahun 2015, meski produksi kakao pada tahun 2014 meningkat dari 18.742 ton menjadi 19.075 ton, namun volume produksi absolut sesungguhnya sudah berkurang drastis sejak tahun 2012 yang menyentuh angka 20.388 ton. Selain itu, produktivitas kakao yang mencapai 1,27 ton/ha pada tahun 2009, kemudian mengalami penurunan sejak tahun 2010 hingga 2013 yaitu rata-rata dibawah 1 ton per hektar.

-
1. Studi lapangan untuk penilaian sektor unggulan dilaksanakan pada tanggal 26 Juni-31 Juli 2015.
 2. Laporan Riset "Pengembangan Iklim Usaha Bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Produk Unggulan Kabupaten Donggala", KPPOD, 2015.
 3. Data kajian bisnis kakao, Bank Indonesia 2012.

Melihat permasalahan yang ada, Pemerintah Kabupaten Donggala bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dan *Ford Foundation* mencoba mengurai akar masalah yang ada dengan menggunakan pendekatan *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA adalah teknik menganalisis sebuah regulasi yang sudah ada atau sedang dirancang dengan menyajikan berbagai opsi informasi berbasis data empiris kepada para pengambil keputusan tentang dampak, baik dari sisi biaya maupun manfaat dari sebuah regulasi (*instrument for quality improvement*). Dalam metode RIA ditempuh serangkaian tahapan proses yang dijalankan bersama-sama antara tim perumus peraturan dengan *stakeholders* terkait. Tahapan tersebut meliputi: perumusan masalah, identifikasi tujuan, perumusan alternatif tindakan (untuk mencapai tujuan), analisis manfaat-biaya (untuk memilih alternatif yang dianggap terbaik dalam mencapai tujuan), dan strategi implementasi (untuk merealisasi alternatif tindakan yang dipilih). Pada setiap tahapan tersebut dilakukan konsultasi *stakeholders* (para pemangku kepentingan) dan hasilnya lalu dirumuskan dalam sebuah laporan ringkas yang bernama “*RIA Statement* (RIAS)”.

Metode RIA ini dipandang cukup mengakomodir capaian yang diinginkan, antara lain, sebagai alat bantu untuk menganalisis kebijakan secara tepat dan memberikan kesempatan bagi *stakeholders* terkait untuk mengungkapkan pendapatnya. Kemudian yang pada akhirnya, *stakeholders* akan saling berkonsensus dalam perumusan solusi sebagai tindak lanjut perbaikan ke depan.

II. Perumusan Masalah

Dari ragam persoalan dalam pengembangan usaha kakao di Donggala, permasalahan yang paling krusial adalah produktivitas kakao yang rendah. Dari konsultasi dengan para *stakeholders* kakao⁴⁾ dalam lokatitih penguatan kapasitas legislasi (Forum RIA) di Donggala dapat dikelompokkan kedalam tiga faktor utama, yakni:

- ❖ **Pohon kakao sudah tua**, Peremajaan, intensifikasi dan rehabilitasi yang menjadi kegiatan pemberdayaan yang dioptimalisasikan semasa Program Gernas ternyata tidak dapat dijadikan tumpuan petani kakao. Tercatat di tahun 2015, sebanyak 148,487 pohon kakao yang belum menghasilkan dan sebanyak 219,808 hektar tanaman kakao yang diidentifikasi sebagai tanaman tua (tidak menghasilkan)⁵⁾.
- ❖ **Serangan hama penyakit**, dalam proses pengumpulan data dan juga FGD bersama *stakeholders*, permasalahan serangan hama penyakit masih menjadi faktor utama terkait menurunnya produktivitas kakao di Kab. Donggala. Penurunan produksi disebabkan oleh serangan hama jenis *Vascular Streak Dieback* (VSD) dan Penggerek Biji Kakao (PBK). Sejauh ini belum ada solusi konkret, terutama dari Pemda, terkait penanggulangan (pembasmian) hama tersebut. Petani lokal selama ini hanya berinisiatif melakukan metode penyarungan sederhana⁶⁾ untuk mengurangi penyebarannya.
- ❖ **Mutu biji kakao rendah**, dalam budidaya kakao, petani mengeluhkan

4. Daftar stakeholders usaha kakao di Kabupaten Donggala terdapat dalam lampiran II.

5. Data BPS, 2015

6. Metode penyarungan sederhana dilakukan petani dengan membungkus buah kakao dengan plastic atau kertas agar tidak terinfeksi oleh hama. Penyarungan sederhanya ini hanya menggunakan alat sederhana dan hasil modifikasi di wilayah Banawa Selatan melalui pengalaman mengikuti sekolah lapang.

bahwa salah satu masalah dari menurunnya produktivitas adalah rendahnya mutu biji kakao.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti KPPOD⁷⁾ mutu biji kakao di Donggala melebihi standar nasional (lebih dari ukuran 85-110), sehingga produksi biji kakao dengan kualitas baik berangsur menurun dari 20.388 ton (2012) menjadi 19.075 ton (2014). Penurunan kualitas biji kakao ini berdampak kepada harga jual, semakin besar atau kecil ukuran biji kakao mempengaruhi harga jual di pasaran, untuk itu petani harus mempertahankan kualitas biji yang memiliki kadar air dan juga ukuran yang sesuai standar SNI.

Berdasarkan faktor utama tersebut, terdapat permasalahan lain yang menyebabkan munculnya ketiga masalah diatas, dengan dasar penjelasan singkat masing-masing faktor penyebabnya:

- ❖ **Tanaman kakao tidak terawat dengan baik.** Banyak tanaman yang terserang hama, pohon yang sudah tua dan menghasilkan biji yang rendah merupakan akibat dari tidak rutinnya perawatan. Menurut petani, perawatan ini harus dilakukan secara rutin, mengingat kakao merupakan tumbuhan yang tumpang sari dan juga rentan untuk terkena hama penyakit.
- ❖ **Kurangnya pengetahuan petani tentang budidaya kakao.** Berdasarkan penuturan tiga orang petani yang ditemui dalam wawancara diketahui bahwa belum semua petani mengetahui bagaimana cara mengurangi serangan hama. Pengetahuan yang masih kurang ini mengakibatkan tanaman kakao tidak dirawat secara maksimal.

- ❖ **Perilaku petani kakao yang tidak fokus.** Perkebunan kakao bukan menjadi mata pencaharian pokok penduduk Donggala. Petani juga memiliki mata pencaharian lain, seperti kebun cengkeh, bertani dan melaut. Beragam kegiatan tersebut mengurangi fokus petani dalam budidaya kakao dan pada akhirnya mengakibatkan tanaman kakao menjadi terbengkalai.
- ❖ **Penggunaan sarana produksi untuk budidaya kakao yang tidak maksimal.** Dalam formulir Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menurut para Pendamping Lapangan (PPL) di Kecamatan Banawa, tidak semua Poktan merencanakan pupuk berdasarkan kebutuhan tanaman. Mereka cenderung menulis RDKK berdasarkan kemampuan ekonomi. Hal ini mengakibatkan tanaman menjadi kurang nutrisi sehingga menyebabkan tanaman menjadi tidak sehat.

Hasil konsultasi publik bersama *stakeholders* dan juga berbagai proses yang dilakukan sebelumnya, menyimpulkan bahwa akar masalah yang mengakibatkan munculnya permasalahan di atas adalah:

1. **Akses informasi dan teknologi yang masih kurang,** akses terhadap teknologi dirasakan oleh petani menjadi salah satu akibat dari kurangnya pengetahuan mereka. Alat sederhana yang mereka gunakan tidak sepenuhnya dapat mengatasi penyebaran hama.
2. **Pendampingan penyuluh kurang maksimal,** kurangnya jumlah penyuluh dan juga belum terfokusnya pengetahuan tentang perkebunan kakao menjadi salah satu penyebab dari permasalahan internal petani, seperti

7. Laporan Riset “Pengembangan Iklim Usaha Bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Produk Unggulan Kabupaten Donggala”, KPPOD, 2015.

pengetahuan dan peningkatan fokus dalam merawat tanaman kakao.

3. **Terbatasnya suplai sarana produksi.** Pupuk dan pestisida yang langka dalam pemenuhan kebutuhan budidaya. Pemanfaatan pupuk ini tidak hanya untuk kegiatan persawahan dan perkebunan, namun digunakan juga untuk peternakan. Sehingga tidak ada suplai pupuk khusus untuk kegiatan perkebunan utamanya adalah kakao. Selain itu, ketersediaan bibit kakao yang sesuai dengan kondisi Donggala masih sangat terbatas.
4. **Modal petani rendah.** Kurangnya keterlibatan lembaga keuangan dan juga kurangnya kapasitas keuangan di Koperasi Gapoktan membuat petani menjadi sulit mengakses finansial untuk pembiayaan saprodi dan budidaya.

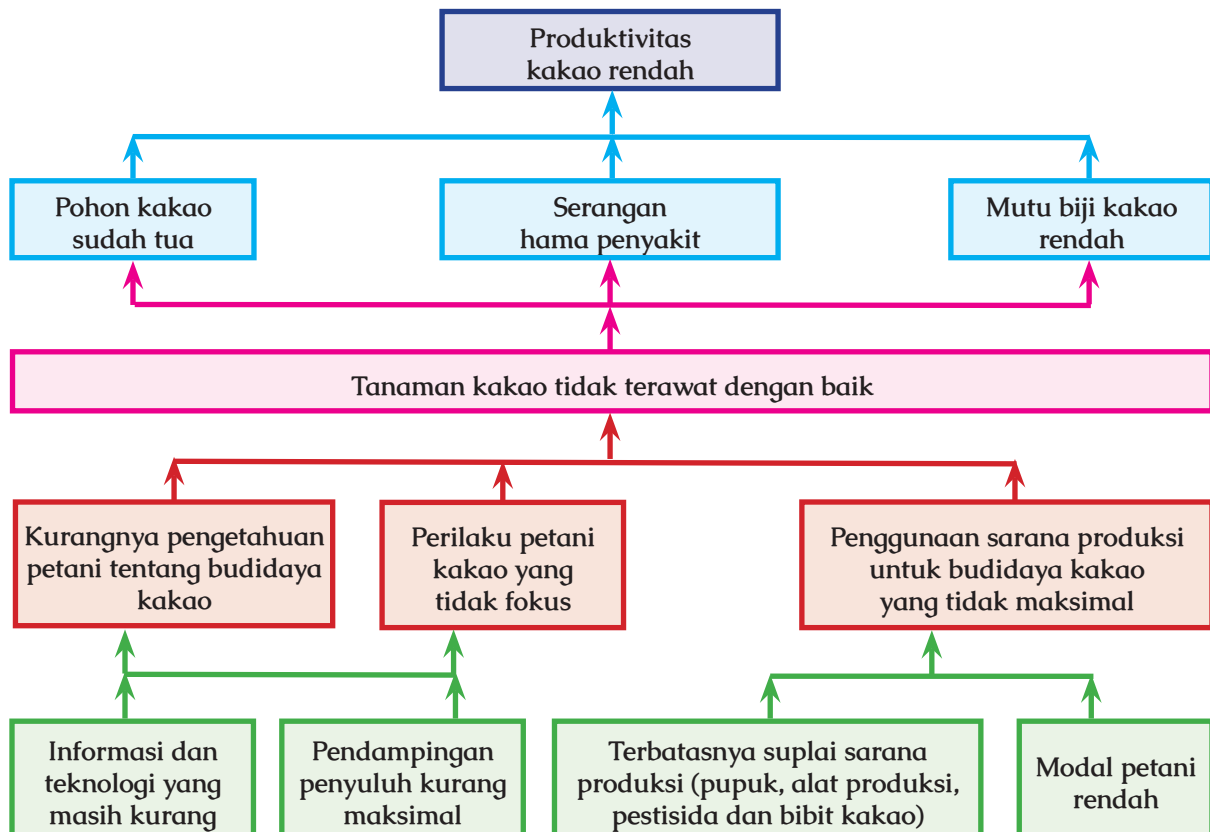
Dengan perumusan masalah tersebut serta hasil temuan hasil riset KPPOD, maka rendahnya produktivitas kakao di Donggala dapat divisualisasi dalam pohon masalah (Gambar 1) berikut ini.

III. Identifikasi Tujuan

Mengalir dari permasalahan yang sudah diuraikan di atas, lalu dirumuskan tujuan umum yang hendak dicapai dalam pengembangan usaha kakao di Kabupaten Donggala, yakni: **“Meningkatkan Produktivitas Tanaman Kakao”**.

Sementara beberapa tujuan khusus untuk mewujudkan tujuan umum tersebut, antara lain perubahan perilaku dari *stakeholders/* aktor yang berperan dalam kegiatan usaha kakao dan mendorong kebijakan serta kelembagaan yang berpihak kepada pengembangan usaha kakao di Kabupaten Donggala.

Gambar 1. Analisis Pohon Masalah



Berikut adalah beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam menyelesaikan akar masalah:

1. Meningkatkan akses informasi dan teknologi bagi petani;
2. Memaksimalkan peran pendampingan penyuluh lapangan khususnya untuk perkebunan kakao;
3. Meningkatkan suplai sarana produksi

- untuk budidaya kakao;
4. Meningkatkan akses modal petani kepada lembaga keuangan.

Terkait dengan alur hubungan logis di atas maka dapat divisualisasi dalam tabel identifikasi tujuan perumusan kebijakan peningkatan produktivitas kakao sebagaimana Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Identifikasi Tujuan

| | |
|---|---|
| 1) Bagian masalah yang ingin diselesaikan: RENDAHNYA PRODUKTIVITAS KAKAO | |
| 2) Sasaran yang ingin dicapai: MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS KAKAO | |
| 3) Pelaku dan Perilaku: | |
| a) Pelaku utama (<i>key players</i>) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani 2. Lembaga Keuangan/Perbankan 3. Perusahaan/ Industri Kakao 4. Distanbun Kab. Donggala 5. Bappeda Kab. Donggala 6. Perbankan/ Lembaga Keuangan 7. BP4K Kab. Donggala |
| b) Perilaku yang diinginkan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani melakukan perawatan tanaman kakao secara baik. 2. Petani aktif tergabung dan terlibat dalam poktan dan gapoktan. 3. Lembaga keuangan (Bank) memberikan kemudahan (skema) kredit bagi petani dan intensif dalam mensosialisasikan program-program untuk petani kakao. 4. Lembaga keuangan bekerjasama dengan Pemda menyediakan modal produksi kepada petani sebagai insentif bagi petani untuk melakukan penebangan pohon dan peremajaan tanaman kakao. 5. Perusahaan/ Industri kakao Menjalin kemitraan dengan petani kakao dalam bentuk pembinaan kelompok melalui bantuan saprodi dan pendampingan penerapan teknologi budidaya. 6. Distanbun menjalankan fungsi perencanaan dan implementasi program khusus terhadap pemberdayaan petani kakao dengan lebih baik. 7. Bappeda menyediakan anggaran yang cukup untuk perencanaan dan implementasi program pemberdayaan petani kakao dengan koordinasi bersama Distanbun. 8. Kualitas dan kuantitas dari PPL untuk dapat memberikan pendampingan yang intensif kepada petani kakao dan juga UPH. |
| 4) Faktor yang Mendorong dan Menghambat: | |
| a) Pihak yang dapat mendorong | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat 2. Dinas Perkebunan dan Kehutanan Prov. Sulteng |

4) Faktor yang Mendorong dan Menghambat:

| | |
|--------------------------------|--|
| a) Pihak yang dapat mendorong | <ol style="list-style-type: none">3. Bupati Donggala4. FP-UNTAD5. Perusahaan/ Industri kakao6. Forum Kakao Sulteng |
| b) Pihak yang dapat menghambat | <ol style="list-style-type: none">1. Perbankan (ketatnya persyaratan formal dalam penyaluran kredit bagi petani kakao menyulitkan petani untuk memenuhi ketentuan administratif/formal dan juga jaminan kredit yang tidak mampu diserahkan oleh petani)2. Pedagang pengumpul dan/atau tengkulak (menawarkan kredit persyaratan yang lebih ringan dari perbankan tetapi dengan bunga yang tinggi) |
| c) Faktor yang mendorong | <ol style="list-style-type: none">1. Keinginan kuat dari empat orang petani yang ditemui⁸⁾ untuk meningkatkan taraf hidup dan menjadikan kakao sebagai sumber pendapatan utama.2. Motivasi yang tinggi dari petani untuk fokus merawat kebun secara berkala.3. Komitmen dari Bupati dan Wakil Bupati untuk mendorong perkembangan produk unggulan Donggala melalui Kakao.4. Dukungan perencanaan anggaran dan program yang mendorong pengembangan kakao5. Keberadaan program-program kegiatan dari FP-UNTAD selaku akademisi yang dapat mampu memberikan informasi dan teknologi tanaman kakao kepada petani.6. Komunikasi dan koordinasi dari Pemprov Sulteng dan Pemkab Donggala untuk berkomitmen bersama dalam kegiatan pengembangan kakao.7. Terjalannya integrasi dan juga komitmen dari forum stakeholder kakao untuk melakukan pengembangan kapasitas petani, serta tetap mendorong geliat perdagangan kakao di Kab. Donggala |
| d) Faktor yang menghambat | <ol style="list-style-type: none">1. Tidak ada modal yang cukup untuk melakukan peremajaan tanaman kakao.2. Petani kesulitan memenuhi persyaratan formal untuk mengakses permodalan di lembaga keuangan (perbankan).3. Ketiadaan jaminan dari petani untuk mengakses perbankan.4. Kemampuan anggaran Pemda Donggala untuk dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan penyuluhan masih terbatas. |

IV. Alternatif Tindakan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas maka kemudian dilakukan identifikasi berbagai opsi atau alternatif

tindakan yang dinilai relevan dan efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang mengakibatkan rendahnya produktivitas kakao di Kabupaten Donggala. Alternatif tindakan yang disampaikan berikut ini

8. Studi rantai nilai pada tanggal 28 Juni-31 Juli 2015

adalah hasil identifikasi berdasarkan konsultasi dengan *stakeholders* terkait.

IV.1. Opsi 1: Do Nothing

Opsi *do nothing* (tidak melakukan tindakan apapun) berarti Pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran ataupun membuat perencanaan program dalam rangka peningkatan produktivitas kakao para petani. Kalau opsi ini yang dipilih pemerintah maka kondisi produktivitas kakao yang rendah di Donggala akan dibiarkan dan terus terjadi sehingga para petani kakao tidak akan mengalami peningkatan penghasilan dari komoditas tersebut.

Dampak kemudian dari rendahnya penghasilan petani adalah peralihan komoditas dari kakao kepada komoditas lainnya (seperti kelapa sawit, kelapa atau cengkeh) yang cenderung tidak lebih menguntungkan dan pada dasarnya bukan merupakan usaha perkebunan rakyat. Secara keseluruhan, kondisi ini akan menimbulkan kerugian bagi Kabupaten Donggala karena kesejahteraan petani terus menurun serta hilangnya komoditas unggulan yang dapat diandalkan sebagai titik ungkit pertumbuhan ekonomi daerah.

IV.2. Opsi 2: Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao

Dalam opsi ini, rendahnya produktivitas kakao di Kabupaten Donggala dilihat melalui rangkaian permasalahan yang dialami oleh petani, terkait dengan budidaya kakao. Merujuk kepada perumusan tujuan bahwa peningkatan produktivitas dapat dicapai jika pilihan alternatif tindakan dapat mengakomodir. Pada konsultasi publik yang telah dilakukan, forum bersepakat bahwa salah satu opsi yang ditawarkan adalah dengan membuat perencanaan program terpadu pengembangan kakao.

Perencanaan ini meliputi permasalahan pengembangan kakao dari hulu sampai hilir, sehingga berbagai aktivitas yang termuat didalamnya diidentifikasi mulai dari rantai nilai produksi hingga perdagangan. Berikut adalah rincian aktivitas opsi 2:

1. **Perencanaan *Masterplan* Program Terpadu Pengembangan Kakao.** Didalamnya mengakomodir tentang aktivitas pengembangan kakao yang sudah diidentifikasi sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Rincian kegiatan yang dilakukan dalam *masterplan* terdiri dari:
 - a. **Penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana perkebunan kakao.** Masalah tentang kelangkaan sarana produksi dirasakan oleh petani dan menjadi hal yang penting untuk kegiatan budidaya, untuk itu persediaan dari saprodi dapat membantu untuk mengatasi kelangkaan tersebut.
 - b. **Peremajaan, rehabilitasi dan intensifikasi tanaman kakao secara berkelanjutan (*Good Agriculture Practice*).** Penyebab dari permasalahan produktivitas kakao yang rendah disebabkan karena perawatan tanaman kakao yang tidak maksimal oleh petani. Dengan demikian dibutuhkan *good agriculture practice* yang dilakukan oleh petani kakao itu sendiri.
 - c. **Meningkatkan kapasitas dan jumlah penyuluh yang berkompeten di bidang kakao.** Ketersediaan penyuluh profesional yang berkompeten di bidang kakao juga merupakan aktivitas penting dalam perancangan *masterplan*. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman bagi petani kakao mengenai cara perawatan tanaman kakao yang baik (*good agriculture practice*) dan cara menggunakan saprodi yang tepat.

- d. **Sertifikasi lahan perkebunan petani kakao.** Guna mendukung posisi tawar petani di rantai nilai kakao dan kemudahan petani kakao dalam akses modal di perbankan maka proses sertifikasi lahan perkebunan kakao perlu segera ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan agar petani memiliki kepemilikan yang jelas akan lahan perkebunannya yang dapat dijadikan agunan oleh lembaga pembiayaan.
 - e. **Memfasilitasi akses modal petani kakao.** Fasilitas petani kakao dengan lembaga pembiayaan menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi petani dalam akses modal sehingga petani mampu menyediakan kebutuhan saprodi untuk perawatan tanaman kakao.
 - f. **Memperkuat kelembagaan petani kakao.** Selain meningkatkan kapasitas petani, Pemda juga melakukan aktivitas dalam rangka memperkuat kelembagaan petani kakao melalui peningkatan kemampuan manajemen dan keuangan yang baik.
 - g. **Memaksimalkan peran dan fungsi Forum Komunikasi Kakao.** Memanfaatkan forum komunikasi kakao Sulteng sebagai bagian dari komunikasi antar *stakeholders* rantai nilai kakao dalam menyelesaikan permasalahan kakao Donggala.
2. **Menerbitkan SK Bupati tentang Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao.**
Bentuk komitmen Pemda Donggala dalam peningkatan produktivitas kakao melalui program terpadu pengembangan kakao maka bupati menerbitkan SK sebagai landasan hukum bagi SKPD terkait.
 3. **Penyusunan rencana kerja Tim Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao.**

Sebagai bentuk komitmen *stakeholders* rantai nilai kakao maka dibentuklah rencana kerja tim implementasi yang terdiri dari anggota *stakeholders* yang dapat berperan di masing-masing tingkatan rantai nilai.

IV.3. Opsi 3: Pembentukan Forum Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholders Rantai Nilai Kakao

Opsi ketiga menitik beratkan kepada peran masing-masing *stakeholders*. Seperti yang teridentifikasi pada identifikasi tujuan, bahwa jika perilaku dari masing-masing *stakeholders* berubah, maka tujuan utama dapat terjawab. Untuk memaksimalkan fungsi dari masing-masing *stakeholders* maka dibutuhkan suatu forum kerjasama dan koordinasi yang berfungsi untuk menanggulangi masalah secara integral di setiap tahapan rantai nilai. Terkait dengan opsi *Pembentukan Forum Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholders Rantai Nilai Kakao*, pada pilihan tindakan ini mengakomodir tentang aktivitas yang dapat dilakukan oleh forum tersebut, berikut rincian aktivitas yang dilakukan:

1. **Penerbitan SK Bupati tentang Forum Kerjasama Multi Pihak untuk Pengembangan Rantai Nilai Kakao.** SK Bupati dibuat dengan tujuan agar seluruh aktivitas serta keanggotaan forum kerjasama terlegalisasi. Dalam SK ini akan menyebutkan tentang kewenangan, aktivitas dan juga dukungan anggaran untuk operasionalisasi kegiatan forum. Untuk struktur kelembagaan dan juga anggota dari forum, peserta lokalatih RIA yang memiliki latar belakang diberbagai bidang maka memungkinkan untuk menjadikan mereka sebagai anggota forum.
2. **Merancang cakupan tugas pokok dan Fungsi Forum Kerjasama dan Koordinasi Kakao:**
 - a. **Optimalisasi pola kemitraan petani,**

pengusaha dan pedagang sebagai rantai nilai kakao.

Aktivitas optimalisasi pola kemitraan petani, pengusaha dan pedagang bertujuan untuk memaksimalkan pola koordinasi dan kerjasama antar rantai nilai. Hal ini pada akhirnya dapat berdampak kepada meningkatnya pengetahuan petani serta terbukanya penyelesaian masalah dari sektor hulu rantai nilai kakao.

b. Menata pola distribusi/tataniaga kakao.

Penataan pola distribusi kakao merupakan aktivitas yang dikerjakan oleh forum kerjasama dan koordinasi kakao dalam rangka memberikan pengetahuan kepada petani kakao dalam memotong rantai nilai yang tidak perlu.

c. Mendorong inovasi di sektor hulu dan pengolahan kakao.

Melalui forum kerjasama dan koordinasi kakao perlu ditekankan mengenai inovasi di sektor hulu dalam pengolahan kakao guna meningkatkan pemahaman petani akan perawatan tanaman, teknologi serta penanganan hama dan penyakit dengan tepat.

d. Membantu peningkatan akses permodalan petani kakao.

Forum kerjasama dan koordinasi juga memiliki aktivitas untuk memfasilitasi akses permodalan kepada petani kakao Donggala, sehingga tidak terbebani oleh persyaratan yang memberatkan serta peran perbankan juga diperlukan dalam ketersediaan KUR bagi petani kakao.

e. Mendorong peningkatan peran dan fungsi kelembagaan petani kakao.

Melalui forum kerjasama dan koordinasi kakao, pihak-pihak rantai nilai yang lainnya dapat memberikan pengetahuan tentang manajemen kelembagaan petani kakao serta memaksimalkan peran kelompok tani di dalam forum

kerjasama dan koordinasi kakao.

f. Memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh *stakeholders* terkait kakao.

Forum digunakan sebagai wadah bagi *stakeholders*, termasuk pemerintah, dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di seluruh tingkatan rantai nilai dari hulu hingga hilir komoditas kakao.

IV.4. Opsi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao

Opsi berikutnya adalah terkait dengan penyelesaian masalah mengenai kapasitas petani dan teknik terkait perawatan tanaman kakao yang masih kurang, maka opsi ke empat memberikan pilihan untuk memberikan peningkatan kapasitas kelembagaan. Selama ini kelembagaan petani kakao tidak berfungsi dengan maksimal dan tidak seluruh kelembagaan petani kakao dilegalisasi oleh Pemda melalui Surat Keputusan (SK). Oleh karena itu, opsi *Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao* menjadi sebuah pilihan opsi untuk menjawab permasalahan kelembagaan petani kakao yang berdampak terhadap rendahnya produktivitas kakao di Donggala. Berikut rincian aktivitas yang dapat dilakukan terkait dengan Opsi tersebut:

1. Legalisasi Kelembagaan Petani Kakao Donggala

Menerbitkan SK Bupati terhadap kelompok petani kakao di seluruh Donggala. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan posisi tawar petani dalam memperoleh bantuan saprodi, akses modal serta informasi dan pengetahuan dari *stakeholders* lainnya.

2. Memfasilitasi Akses Modal Kelembagaan Petani Kakao

Pemda memfasilitasi akses modal dari kelompok tani kepada pihak perbankan guna mendapatkan kemudahan akses modal dalam rangka peningkatan

modal petani dalam perawatan tanaman kakao.

3. **Meningkatkan Kapasitas dan Peran kelembagaan petani.**
Pemda melakukan pelatihan terhadap kelompok tani mengenai manajemen kelembagaan serta keuangan dan kemudian meningkatkan peran kelembagaan petani sebagai pusat komunikasi dan koordinasi dari Pemda dan *stakeholders* lainnya.
4. **Meningkatkan kapasitas dan jumlah penyuluh yang berkompeten untuk memberikan penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kakao.**
Pemda menyelenggarakan pelatihan kepada penyuluh khusus untuk penguatan kelembagaan petani serta pengembangan kakao dan rekrutmen penyuluh yang berkompeten di bidang kakao. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam kelembagaan maupun kemampuan dalam merawat tanaman kakao.

V. Analisis Biaya dan Manfaat

Langkah penting dalam metode RIA adalah melakukan analisis biaya dan manfaat. Langkah ini dilakukan untuk melakukan perbandingan biaya (*cost*) dan manfaat (*benefit*) untuk memilih suatu alternatif tindakan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka untuk menentukan alternatif apa yang kemudian dipilih untuk memberikan manfaat yang besar dan biaya yang cukup rendah. Berikut analisis manfaat dan biaya yang dilakukan pada masing-masing alternatif tindakan.

V.1. Opsi 1: Do Nothing

Alternatif pilihan pertama adalah *do nothing*, merupakan pilihan tindakan untuk tidak melakukan apapun dan membiarkan kondisi tetap berlangsung sebagaimana kenyataannya. Alternatif tindakan ini memperlihatkan kondisi apa adanya petani

kakao Donggala sebagaimana dijelaskan di dalam tabel 2. Sedangkan resiko yang akan dihadapi ketika tidak ada tindakan apapun dari pemerintah dijelaskan di dalam tabel 3. Opsi ini memberikan pilihan bagi Pemda untuk tidak melakukan apa-apa atas kondisi yang ada, yakni menurunnya produktivitas kakao. Untuk menjabarkan kondisi yang ada dapat dilihat berdasarkan tabel 2. Bahwa terdapat beberapa permasalahan yang cukup penting jika tidak ada tindak lanjut dari pemerintah yakni besarnya alih lahan kakao menuju lahan sawit (6.407 Ha), jumlah tanaman kakao yang tidak menghasilkan (2.125.456 pohon) dan besarnya lahan kakao yang sudah tua (218.808 Ha). Jika kondisi ini dibiarkan tentu angka akan semakin meningkat dan peralihan lahan kakao menuju lahan sawit akan meningkat dan tanaman sawit sendiri tidak cukup menguntungkan bagi petani Donggala dan bukan termasuk produk unggulan daerah.

Opsi *Do Nothing*, menunjukkan permasalahan akan tetap terjadi dan dibiarkan maka dari itu berdasarkan hasil forum *stakeholder* Tabel 3 menggambarkan analisis resiko atas tindakan *Do Nothing*. Berdasarkan tabel tersebut terdapat dua belas resiko yang terjadi jika tidak ada intervensi dari Pemda. Selain itu, kedua belas resiko itu memiliki tingkat resiko yang besar terutama bagi petani dan juga sektor usaha kakao (coklat) di Donggala.

V.2. Opsi 2: Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao

Pilihan alternatif kedua merupakan pilihan untuk membuat perencanaan program terpadu hanya untuk pengembangan kakao. Terdapat beberapa kegiatan yang menunjang dalam rangka peningkatan produktivitas komoditas kakao. Pilihan alternatif ini memiliki sejumlah manfaat seperti disajikan pada Tabel 4, dan juga memiliki biaya/beban seperti di lihat pada Tabel 5.

Tabel 2 Indikator dan Baseline Tindakan “Do Nothing”

| No. | Indikator | Baseline | Sumber |
|-----|--|--|---|
| 1. | Produktivitas kakao | 911 kg/ha (2012) | Dinas Hutbun Kab. Donggala |
| 2. | Produksi Kakao | 19.075 Ton (2014) | Data Komoditas Perkebunan di Kab. Donggala Tahun 2013 |
| 3. | Lahan Kakao | 14.656 Ha (2013) | Data Komoditas Perkebunan di Kab. Donggala Tahun 2013 |
| 4. | Jumlah tanaman kakao yang tidak menghasilkan | 2.125.456 (2013) | Data BPS |
| 5. | Jumlah lahan kakao yang sudah tua | 219.808 Ha | Data BPS |
| 6. | Tingkat pendidikan petani rendah | 762 Kelompok Tani sektor perkebunan berstatus pemula | Laporan BP4K |
| 7. | Jumlah alokasi anggaran pada pengembangan kakao | Tidak ada alokasi anggaran khusus pengembangan komoditas kakao | RKPD 2016 |
| 8. | Jumlah luasan alih fungsi lahan kakao (alih fungsi ke lahan sawit) | 6.407 Ha | Laporan Evergreen Indonesia |
| 9. | Jumlah kelompok tani yang sudah diatur dengan SK Bupati | Jumlah kelompok tani yang sudah masuk dalam SK Bupati 1600 yang belum di SK 1882 kelompok tani | Laporan BP4K |

Tabel 3 Analisis Resiko Tindakan “Do Nothing”

| No | Jenis Resiko | Dampak yang ditimbulkan | Kemungkinan terjadi | Tingkat Resiko |
|----|--|-------------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Produksi kakao semakin menurun | Besar | Besar | Besar |
| 2. | Program peningkatan produktivitas kakao tumpang tindih dan tidak fokus | Sedang | Besar | Besar |
| 3. | Serangan hama dan penyakit kakao semakin meningkat | Besar | Besar | Besar |
| 4. | Pengetahuan petani tidak meningkat (tetap) | Sedang | Besar | Besar |
| 5. | Petani sulit mendapat informasi dan bantuan dari Pemerintah dan swasta | Sedang | Besar | Besar |

| No | Jenis Resiko | Dampak yang ditimbulkan | Kemungkinan terjadi | Tingkat Resiko |
|-----|---|-------------------------|---------------------|----------------|
| 6. | Tanaman kakao tidak berproduksi dengan baik | Besar | Besar | Besar |
| 7. | Tanaman mudah terserang penyakit | Besar | Besar | Besar |
| 8. | Petani tidak mampu mengolah lahan kebun kakao dengan baik | Besar | Besar | Besar |
| 9. | Petani terjatuh tengkulak/ijon | Besar | Sedang | Besar |
| 10. | Petani tetap miskin | Besar | Besar | Besar |
| 11. | Program Pemda kurang bermanfaat bagi petani kakao | Sedang | Besar | Besar |
| 12. | Lahan kakao semakin berkurang | Besar | Besar | Besar |

Tabel 4. Analisis Manfaat Opsi 2.

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|--|--|--|-----------------|
| 1. | Pemda | Kejelasan Roadmap pengembangan kakao di Donggala | Tidak memiliki roadmap | Pemda memiliki roadmap sebagai acuan program pengembangan kakao | Tinggi |
| | | Peningkatan PDRB dari sektor pertanian meningkat | Jumlah PDRB 2013: Rp 2.393.370.000.000,- | Jumlah PDRB 2020: Rp 2.893.000.000.000,- ⁹⁾ | Besar |
| | | Pemda memiliki tenaga penyuluh yang profesional khusus sektor perkebunan kakao | Belum ada penyuluh profesional di sektor khusus komoditas kakao | Tersedianya penyuluh profesional di sektor khusus kakao | Besar |
| 2. | Petani | Pengetahuan petani meningkat terkait perawatan tanaman kakao | Petani belum memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Petani memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Besar |
| | | Pendapatan petani dari kakao meningkat | Rata-rata pendapatan petani kakao tahun 2016 Rp 18.000.000,-/KK/Tahun | Rata-rata pendapatan petani kakao tahun 2020 Rp 30.110.590,-/KK/Tahun ¹⁰⁾ | Besar |

9. RKPD Kab. Donggala 2016

10. Laporan Penelitian KPPOD. "Pengembangan Iklim Usaha Bagi Peningkatan Rantai Nilai Usaha Produk Unggulan Kab. Donggala". 2016

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|-------------------------------|--|---|---|-----------------|
| 2. | Petani | Kesejahteraan petani sektor pertanian meningkat | NTP subsektor pertanian tahun 2014: 98,49 | NTP subsektor tahun 2020: ≥ 100 ¹¹⁾ | Besar |
| | | Produktivitas kakao meningkat | Produktivitas kakao tahun 2016: 900kg/ha | Produktivitas kakao tahun 2020: 1.250 kg/ha ¹²⁾ | Besar |
| | | Jumlah PPL sebanding dengan jumlah kelompok tani | Perbandingan jumlah kelompok tani dan PPL tertinggi di satu kecamatan dapat mencapai 20:1 ¹³⁾ | Perbandingan jumlah kelompok tani dan PPL dapat berkurang sampai 10:1 | Sedang |
| | | Petani Mendapatkan kemudahan akses modal (penerima KUR) | Tidak ada | Jumlah kelompok tani penerima KUR 2020 sebanyak 200 kelompok | Besar |
| | | Meningkatnya kemampuan petani dalam manajemen usaha tani kakao | Jumlah kelompok tani di masing-masing kelas tahun 2014 Pemula: 762 Madya: 24 Lanjut: 226 Utama: 2 | Jumlah kelompok tani di masing-masing kelas tahun 2020 Pemula: 662 Madya: 74 Lanjut: 276 Utama: 2 | Sedang |
| 3. | Industri | Ketersediaan pasokan biji kakao untuk industri coklat terpenuhi | Terbatasnya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Tersedianya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Besar |
| | | Daya saing industri coklat meningkat | Daya saing industri coklat rendah | Daya saing industri coklat meningkat | Besar |
| 4. | Pedagang | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Keuntungan pedagang biji kakao tetap | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Besar |
| 5. | Masyarakat Umum Kab. Donggala | Penyerapan tenaga kerja terkait usaha kakao meningkat (hulu-hilir) | Penyerapan angkatan kerja Kab. Donggala 136.469 (2014) | Penyerapan angkatan kerja Kab. Donggala 236.469 (2020) | Besar |

11. Laporan BPS

12. Laporan BP4K berdasarkan forum pelatihan RIAS Donggala 2016.

13. Laporan BP4K 2015

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|------------------------------|-----------------------------------|---|-----------------|
| 6. | Perbankan | Serapan target KUR terpenuhi | Serapat target KUR tidak maksimal | Serapan target KUR perbankan dapat maksimal | Sedang |

Tabel 5. Analisis Biaya Opsi 2.

| No | Penerima Biaya | Jenis Beban/ Biaya | Baseline | Prediksi Beban/ Biaya | Tingkat Beban/ Biaya |
|----|----------------|--|---|---|------------------------------|
| 1. | Pemda | Biaya APBD terkait implementasi kebijakan kakao meningkat | APBD Kabupaten Tahun 2015: Rp 2,4 Milyar | APBD Kabupaten Tahun 2016: Rp 5 Milyar | Rp 2,6 Milyar |
| | | Penambahan jumlah penyuluh | Jumlah penyuluh kakao tahun 2016: 167 penyuluh | Penambahan jumlah penyuluh tahun: 334 Penyuluh | 167 penyuluh |
| | | Peningkatan perbandingan petani dan penyuluh | 1800 petani: 40 penyuluh ¹⁴⁾ | 2300 petani: 100 penyuluh | Penyediaan 60 orang penyuluh |
| | | Biaya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan | Rp 1,102,453,151,- ¹⁵⁾ | Rp 2.000.000.000,- | Rp 897.546.849,- |
| | | Biaya Pelatihan Penyuluh | biaya pelatihan penyuluh: Rp 400.000.000,- ¹⁶⁾ | biaya pelatihan penyuluh: Rp 800.000.000,- ¹⁷⁾ | Rp 400.000.000,- |
| | | Biaya melakukan rapat perumusan masterplan | Tidak ada | Besar | besar |
| | | Biaya penerbitan SK Bupati | Tidak ada | Sedang | Sedang |
| | | biaya operasional tim implementasi program | Tidak ada | Besar | Besar |

14. RKPD 2016, Bidang Program BP4K Donggala

15. Ibid

16. Ibid

17. Perbandingan jumlah penyuluh yang meningkat 2 kali sehingga biaya juga meningkat 2 kali

| No | Penerima Biaya | Jenis Beban/ Biaya | Baseline | Prediksi Beban/ Biaya | Tingkat Beban/Biaya |
|----|----------------|---|---|---|--|
| 1. | Pemda | Waktu dan tenaga pemda untuk mengadakan rapat perencanaan | Penambahan waktu kerja pemda diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |
| | | Waktu dan tenaga pemda untuk terus terlibat dalam perencanaan | Penambahan waktu kerja pemda diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |
| 2. | Petani | tenaga kerja yang dilibatkan lebih besar | Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan kakao: 1 orang/ha | Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan kakao: 3 orang/ha | Penambahan jumlah tenaga kerja 2 orang/ha |
| | | Waktu dan tenaga petani mengikuti pelatihan | Penambahan waktu kerja petani diluar pekerjaan utama | Penambahan waktu kerja petani diluar pekerjaan utama | Besar |
| | | Biaya sertifikasi lahan petani kakao | Tidak ada ¹⁸⁾ | Biaya sertifikasi lahan petani kakao ¹⁹⁾ | 5% dari harga tanah (untuk pembayaran BPHTB) |
| 3. | Industri | Biaya penelitian dan pengembangan kakao | Tidak ada | Beban biaya untuk penelitian sedang | Sedang |
| | | Biaya sertifikasi kebun kakao | Tidak ada | Biaya sertifikasi kebun kakao | 5% dari harga tanah (untuk pembayaran BPHTB) |
| | | Waktu dan tenaga pihak swasta/ pengusaha untuk mengikutin rapat perencanaan | Penambahan waktu kerja pihak swasta/ pengusaha diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |

18. RKPD Kab. Donggala 2016

19. Asumsi biaya jika ada petani yang memiliki lahan diatas 2 ha.

| No | Penerima Biaya | Jenis Beban/ Biaya | Baseline | Prediksi Beban/ Biaya | Tingkat Beban/Biaya |
|----|----------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|
| 3. | Industri | Waktu dan tenaga pengusaha untuk terus terlibat dalam pemantauan program | Penambahan waktu kerja pengusaha diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |
| 4. | Perbankan | Biaya sosialisasi KUR | Tidak ada | Beban biaya untuk sosialisasi sedang | Sedang |
| | | Waktu dan tenaga pihak bank untuk mengikuti rapat perencanaan | Penambahan waktu kerja pihak bank diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat mengenai opsi 2 yakni Merumuskan Perencanaan Terpadu Program Pengembangan Kakao memperlihatkan adanya manfaat dan biaya yang beragam. Terdapat aspek penting dalam analisis manfaat sebagaimana dijabarkan pada tabel 4 yang memperlihatkan bahwa adanya dokumen perencanaan bagi Pemda untuk pengembangan kakao dan memperlihatkan terdapat tujuh sektor manfaat yang diterima langsung kepada petani diantaranya adalah peningkatan pendapatan, produktivitas, pengetahuan, dan pendampingan penyuluh yang maksimal.

Namun demikian terdapat biaya yang harus dibebankan kepada pemerintah dan beberapa *stakeholders* sebagaimana tabel 5, yakni diantaranya biaya pelatihan penyuluh, rekrutmen penyuluh dan lainnya yang diproyeksikan Pemda akan terbebani anggaran hingga Rp 8,5 Milyar. Sedangkan *stakeholders* yang dibebankan biaya adalah perbankan (biaya sosialisasi), industri (biaya penelitian sektor hulu kakao) dan petani (waktu dan tenaga untuk mengikuti pelatihan).

V.3. Opsi 3: Pembentukan Forum Kerjasama dan Koordinasi antar Stakeholder Rantai Nilai Kakao

Pilihan alternatif ketiga merupakan pilihan untuk membentuk Forum Kerjasama dan Koordinasi Antar *Stakeholders* Rantai Nilai Kakao. Pilihan alternatif ini memiliki sejumlah manfaat seperti disajikan pada Tabel 6, dan juga memiliki biaya/beban seperti di lihat pada Tabel 7.

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat mengenai opsi 3 yakni Pembentukan Forum Kerjasama Dan Koordinasi antar *Stakeholders* Rantai Nilai Kakao memperlihatkan adanya manfaat dan biaya yang beragam. Terdapat aspek penting dalam analisis manfaat sebagaimana dijabarkan pada tabel 6 yang memperlihatkan bahwa keberadaan forum kerjasama dan koordinasi dapat bermanfaat bagi Pemda maupun seluruh *stakeholders* rantai nilai dalam mawadahi berbagai permasalahan dan peningkatan kapasitas masing-masing *stakeholders*. Selain itu, bagi Pemda akan memberikan manfaat kemudahan koordinasi dan memahami berbagai permasalahan pada sektor kakao. Namun demikian terdapat

Tabel 6. Analisis Manfaat Opsi 3

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|--|--|---|-----------------|
| 1. | Pemda | Optimalisasi peran Pemda terhadap rantai nilai kakao | Tidak memiliki forum kerjasama dan koordinasi stakeholder rantai nilai kakao | Terciptanya forum kerjasama koordinasi antara pemerintah dan pihak-pihak rantai nilai kakao | Besar |
| | | Peningkatan PDRB dari sektor pertanian meningkat | Jumlah PDRB 2013: Rp 2.393.370.000.000,- | Jumlah PDRB 2020: Rp 2.893.000.000.000,- ²⁰⁾ | Besar |
| 2. | Petani | Pengetahuan petani meningkat terkait perawatan tanaman kakao | Petani belum memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Petani memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Besar |
| | | Produktivitas kakao meningkat | Produktivitas kakao tahun 2016: 900kg/ha | Produktivitas kakao tahun 2020: 1.250 kg/ha ²¹⁾ | Besar |
| | | Petani Mendapatkan kemudahan akses modal (penerima KUR) | Tidak ada | Jumlah kelompok tani penerima KUR 2020 sebanyak 200 kelompok | Besar |
| | | Tersedianya sarana kerjasama dan koordinasi antara petani dan berbagai pihak di rantai nilai kakao | Tidak memiliki forum kerjasama dan koordinasi <i>stakeholders</i> rantai nilai kakao | Terciptanya forum kerjasama koordinasi antara petani dan pihak-pihak rantai nilai kakao | Besar |
| | | Terciptanya kepercayaan perbankan terhadap pinjaman yang diberikan kepada petani | Tidak memiliki forum kerjasama dan koordinasi <i>stakeholders</i> rantai nilai kakao | Terciptanya forum kerjasama koordinasi antara petani dan pihak-pihak rantai nilai kakao | Besar |
| 3. | Industri | Ketersediaan pasokan biji kakao untuk industri coklat terpenuhi | Terbatasnya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Tersedianya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Besar |

20. RKPD Kab. Donggala 2016

21. Laporan BP4K berdasarkan forum pelatihan RIAS Donggala 2016.

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|---|--|---|-----------------|
| 3. | Industri | Daya saing industri coklat meningkat | Daya saing industri coklat rendah | Daya saing industri coklat meningkat | Besar |
| | | Industri (pihak swasta) dapat meningkatkan produksinya dengan memaksimalkan produktivitas bahan mentah (kakao) melalui intervensi petani dalam forum kerjasama dan koordinasi | Tidak memiliki forum kerjasama dan koordinasi stakeholder rantai nilai kakao | Terciptanya forum kerjasama koordinasi antara petani dan pihak-pihak rantai nilai kakao | Besar |
| 4. | Pedagang | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Keuntungan pedagang biji kakao tetap | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Besar |
| | | Pedagang dapat memaksimalkan fungsinya dalam rantai nilai kakao dan menjawab permasalahan di rantai nilai kakao | Tidak memiliki forum kerjasama dan koordinasi stakeholder rantai nilai kakao | Terciptanya forum kerjasama koordinasi antara petani dan pihak-pihak rantai nilai kakao | Besar |
| 5. | Perbankan | Serapan target KUR terpenuhi | Serapan target KUR tidak maksimal | Serapan target KUR perbankan dapat maksimal | sedang |

Tabel 7. Analisis Biaya Opsi 3

| No | Penerima Biaya | Jenis Biaya | Baseline | Prediksi Beban/Biaya | Tingkat Beban/Biaya |
|----|----------------|---|--|---|--------------------------|
| 1. | Pemda | Biaya untuk persiapan pembentukan forum | Tidak ada | Rp 100.000.000 ²²⁾ | Rp 100.000.000 |
| | | Biaya alokasi untuk kegiatan kerjasama dan koordinasi forum kakao | Tidak ada alokasi pembentukan forum kerjasama dan koordinasi kakao | Rp 120.000.000 per tahun ²³⁾ | Rp 120.000.000 per tahun |

22. Biaya dihitung berdasarkan honor dan konsumsi pada saat rapat

23. Biaya dihitung dari estimasi pertemuan awal sebesar 100 juta, kemudian dikalikan dengan 12 bulan.

| No | Penerima Biaya | Jenis Biaya | Baseline | Prediksi Beban/Biaya | Tingkat Beban/Biaya |
|----|----------------|--|--|---|---|
| 1. | Pemda | Waktu dan tenaga pemda untuk mengikuti forum kerjasama dan koordinasi rantai nilai kakao | Penambahan waktu kerja pemda diluar pekerjaan utama | Besar | Besar |
| 2. | Petani | tenaga kerja yang dilibatkan lebih besar | Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan kakao: 1 orang/ha | Jumlah tenaga kerja sektor perkebunan kakao: 3 orang/ha | Penambahan jumlah tenaga kerja 2 orang/ha |
| | | Waktu dan tenaga petani untuk mengikuti forum kerjasama dan koordinasi rantai nilai kakao | Waktu kerja petani hanya untuk pekerjaan utama (perawatan kakao) | Besar | Besar |
| 3. | Industri | Biaya, waktu dan tenaga pihak industri (swasta) untuk mengikuti forum kerjasama dan koordinasi rantai nilai kakao | Jumlah biaya, waktu dan tenaga hanya untuk kepentingan pelaksanaan industri | Penambahan biaya, waktu dan tenaga diluar kepentingan pekerjaan industri | Besar |
| 4. | Pedagang | Biaya, waktu dan tenaga pihak industri (swasta) untuk mengikuti forum kerjasama dan koordinasi rantai nilai kakao | Jumlah biaya, waktu dan tenaga hanya untuk kepentingan perdagangan | Penambahan biaya, waktu dan tenaga diluar kepentingan pekerjaan utama yakni perdagangan | Besar |
| 5. | Perbankan | Biaya, waktu dan tenaga pihak perbankan dalam keterlibatannya di dalam forum kerjasama dan koordinasi rantai nilai kakao | Jumlah biaya, waktu dan tenaga hanya untuk kepentingan operasional perbankan | Penambahan biaya, waktu dan tenaga diluar kepentingan pekerjaan utama perbankan | Besar |

biaya yang harus dibebani kepada pemerintah dan beberapa *stakeholders* lainnya sebagaimana tabel 7 yakni diantaranya biaya alokasi pembentukan forum kerjasama dan koordinasi kakao serta anggaran dalam menjalankan aktivitas, yang diproyeksikan Rp. 2,9 Milyar dan belum ditambah dengan biaya persiapan pembentukan forum. Sedangkan seluruh *stakeholders* yang tergabung di dalam rantai nilai dibebankan biaya, waktu dan tenaga dalam mempersiapkan

dan membentuk forum kerjasama dan koordinasi kakao tersebut.

V.4. Opsi 4: Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao

Pilihan alternatif keempat merupakan pilihan untuk Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Petani Kakao. Pilihan alternatif ini memiliki sejumlah manfaat seperti disajikan pada Tabel 8, dan juga memiliki biaya/beban seperti pada Tabel 9.

Tabel 8. Analisis Manfaat Opsi 4

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|--|--|--|-----------------|
| 1. | Pemda | Terdapat Database lengkap Kelembagaan Petani Kakao di Donggala | Database Kelembagaan Petani Kakao di Donggala tidak lengkap | Terciptanya kemudahan komunikasi Pemda dengan lembaga petani kakao | Sedang |
| | | Peningkatan PDRB dari sektor pertanian meningkat | Jumlah PDRB 2013: Rp 2.393.370.000.000,- | Jumlah PDRB 2020: Rp 2.893.000.000.000,- ²⁴⁾ | Besar |
| | | Kemudahan Koordinasi dengan petani kakao di Donggala | Sulit untuk melakukan koordinasi dengan petani kakao di Donggala | Kemudahan Koordinasi dengan petani kakao di Donggala | Besar |
| 2. | Petani | Pengetahuan petani meningkat terkait perawatan tanaman kakao | Petani belum memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Petani memahami secara menyeluruh mengenai perawatan tanaman kakao | Besar |
| | | Peningkatan Kemampuan Manajemen petani kakao | Tingkat kemampuan manajemen lembaga petani rendah | Petani mampu memaksimalkan fungsi kelembagaan petani | Besar |

24. RKPD Kab. Donggala 2016

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|------------------|--|--|---|-----------------|
| 2. | Petani | Produktivitas kakao meningkat | Produktivitas kakao tahun 2016: 900kg/ha | Produktivitas kakao tahun 2020: 1.250 kg/ha ²⁵⁾ | Besar |
| | | Petani Mendapatkan kemudahan akses modal (penerima KUR) | Tidak ada | Jumlah kelompok tani penerima KUR 2020 sebanyak 200 kelompok | Besar |
| | | Meningkatkan nilai tawar petani terhadap pemda, swasta dan perbankan | Petani kakao tidak seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Petani kakao seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Besar |
| | | Perbankan memiliki kepercayaan kepada kelembagaan petani dalam memberikan pinjaman | Petani kakao tidak seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani dan memiliki manajemen yang buruk | Petani kakao seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani dan memiliki kemampuan manajemen yang baik | Besar |
| 3. | Industri | Ketersediaan pasokan biji kakao untuk industri coklat terpenuhi | Terbatasnya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Tersedianya pasokan biji kakao untuk industri coklat | Besar |
| | | Daya saing industri coklat meningkat | Daya saing industri coklat rendah | Daya saing industri coklat meningkat | Besar |
| | | Kemudahan koordinasi antara pihak swasta (industri) kepada petani | Petani kakao tidak seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Petani kakao seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Besar |
| 4. | Pedagang | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Keuntungan pedagang biji kakao tetap | Keuntungan pedagang biji kakao meningkat | Besar |
| | | Kemudahan pedagang berkomunikasi dan bekerjasama dengan petani-petani kakao | Petani kakao tidak seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Petani kakao seluruhnya tergabung dalam kelembagaan petani | Besar |

25. Laporan BP4K berdasarkan forum pelatihan RIAS Donggala 2016.

| No | Penerima Manfaat | Jenis Manfaat | Baseline | Prediksi Manfaat | Tingkat Manfaat |
|----|-------------------------------|--|--|--|-----------------|
| 5. | Masyarakat Umum Kab. Donggala | Penyerapan tenaga kerja terkait usaha kakao meningkat (hulu-hilir) | Penyerapan angkatan kerja Kab. Donggala 136.469 (2014) | Penyerapan angkatan kerja Kab. Donggala 236.469 (2020) | Besar |
| 6. | Perbankan | Serapan target KUR terpenuhi | Serapan target KUR tidak terpenuhi | Serapan target KUR perbankan dapat terpenuhi | Besar |

Tabel 9. Analisis Biaya Opsi 4

| No | Penerima Biaya | Jenis Beban/Biaya | Baseline | Prediksi Beban/Biaya | Tingkat Beban/Biaya |
|----|----------------|--|--|--|------------------------------|
| 1. | Pemda | Biaya alokasi pendataan dan legalisasi lembaga petani kakao di Donggala | - | Biaya alokasi tambahan untuk pendataan dan legalisasi lembaga petani kakao di Donggala | Kecil |
| | | Biaya alokasi untuk penerbitan SK Lembaga Petani Kakao di seluruh Donggala | Rp 472.500.000/10 Kelompok ²⁶⁾ | Biaya alokasi SK lembaga petani kakao seluruh donggala | Sedang |
| | | Peningkatan perbandingan petani dan penyuluh | 1800 petani : 40 penyuluh ²⁷⁾ | 2300 petani : 100 penyuluh | Penyediaan 60 orang penyuluh |
| | | Biaya sistem penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan | Rp 1,102,453,151,- ²⁸⁾ | Rp 2.000.000.000,- | Rp 897.546.849,- |
| 2. | Petani | Waktu dan tenaga petani untuk mengikuti pelatihan dan manajemen kelembagaan petani | Waktu kerja petani hanya untuk pekerjaan utama (perawatan kakao) | Penambahan waktu kerja petani diluar pekerjaan utama | Sedang |

26. RKPD Kab. Donggala 2016

27. Laporan RKPD 2016, Bidang Program BP4K Donggala

28. RKPD Kab. Donggala 2016

Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat mengenai opsi 4 yakni Melegalisasi Kelembagaan Petani Kakao memperlihatkan adanya manfaat dan biaya. Terdapat aspek penting dalam analisis manfaat sebagaimana dijabarkan pada tabel 8 yang memperlihatkan bahwa melalui legalisasi kelembagaan petani kakao maka Pemda akan memiliki database seluruh petani kakao di Donggala serta kemudahan koordinasi dengan petani kakao di Donggala. Selain itu, bagi petani akan mempermudah petani dalam mengatur kelembagaan dan keuangan petani, memaksimalkan informasi dan kerjasama antar petani dan *stakeholders* serta meningkatkan kepercayaan perbankan kepada petani kakao. Namun demikian terdapat biaya yang harus dibebani kepada pemerintah dan beberapa *stakeholders* lainnya sebagaimana tabel 9 yakni diantaranya biaya alokasi penerbitan SK Bupati untuk 200 kelompok petani kakao serta anggaran dalam menjalankan aktivitas, yang diproyeksikan Rp. 2,6 Milyar dan ditambah dengan biaya penerbitan SK dan survei kelompok tani kakao. Sedangkan seluruh *stakeholders* yang mendapatkan beban terbesar adalah petani itu sendiri yang harus memaksimalkan perannya dalam pelatihan dan peningkatan kapasitas petani dalam kelompok petani kakao.

V.5. Alternatif Terpilih: Opsi 2

Berdasarkan hasil perhitungan biaya dan manfaat, tim perumus dan di dalam forum *stakeholders* kakao telah menyepakati bahwa Alternatif Kedua: “Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao memberikan manfaat yang paling besar dalam rangka mencapai tujuan peningkatan produktivitas kakao.”

Di dalam Opsi 2, meskipun memiliki besaran biaya nominal yang lebih besar dibandingkan dengan opsi 3 dan 4 tetapi jumlah besarnya dapat diprediksi karena Pemda telah memiliki program yang menyerupai program-program

sebelumnya. Sedangkan opsi 3 dan opsi 4 proyeksi besaran nominal masih sulit diprediksi besarnya. Selain itu Opsi 2 memberikan manfaat yang lebih mengarah kepada tujuan utama yakni peningkatan produktivitas kakao yakni melalui *masterplan* dan tim implementasi yang menjalankan aktivitas yang terpusat kepada tanaman kakao. Hal ini lebih baik dikarenakan aktivitas langsung tertuju kepada sumber masalah yakni fasilitasi akses modal, ketersediaan penyuluh, saprodi, dan peningkatan informasi dan teknologi bagi petani. Jika dibandingkan opsi 3 yang membentuk forum kerjasama, masing-masing *stakeholders* membutuhkan alokasi waktu tambahan diluar pekerjaan utama untuk mendesain kelembagaan forum kerjasama. Sedangkan dalam opsi 2, masing-masing *stakeholders* dengan tugas pokok dan fungsinya tidak perlu membentuk kelembagaan lagi, tetapi hanya cukup dengan berkumpul serta menyepakati keputusan forum. Untuk opsi 4, tentang meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, opsi ini hanya melibatkan dua aktor yang searah (Pemerintah daerah dan Petani), sehingga keberlanjutan pengembangan kakao tidak dapat dikawal secara terus menerus. Hal ini juga menjadi salah satu keunggulan opsi 2, yang memungkinkan untuk terus melakukan pemantauan program pengembangan kakao melalui masterplan. Maka dengan demikian opsi 2 Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao menjadi opsi yang terpilih dalam peningkatan produktivitas kakao di Donggala.

Berdasarkan hasil perhitungan biaya manfaat, tim perumus telah menyepakati bahwa Alternatif Kedua: Merumuskan Perencanaan Program Terpadu Pengembangan Kakao memberikan manfaat yang paling besar serta memiliki capaian tujuan peningkatan produktivitas kakao.

Aktivitas yang dapat ditempuh untuk mengimplementasikan alternatif kedua

adalah melalui tiga sasaran:

1. **Penerbitan SK Bupati tentang Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao 2016-2020.**
Penerbitan SK Bupati berfungsi sebagai alat kepastian hukum atas pelaksanaan kegiatan pengembangan kakao. Dalam SK tersebut juga menyebutkan pihak yang bertanggungjawab beserta konsekuensi anggarannya.
2. **Perencanaan *Masterplan* Program Terpadu Pengembangan Kakao.**
Mengingat permasalahan kakao terjadi dari hulu ke hilir, maka kondisi demikian membutuhkan sebuah perencanaan yang berkelanjutan hingga dapat dicapai hasil maksimal. Perencanaan tersebut dapat dituangkan melalui masterplan program dibawah kewenangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan serta Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA) Kab. Donggala.
3. **Menyusun rencana kerja Tim Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao.** Dalam mengimplementasikan SK Bupati dan *Masterplan* program pengembangan kakao maka dibutuhkan sebuah rencana kerja tim implementasi. Hal ini dilakukan sebagai jembatan antara perencanaan pemerintah dan implementasi yang menjalankan program serta aktivitas untuk pengembangan kakao di Kab. Donggala. Tim implementasi ini dibawah

kewenangan Dinas Perkebunan dan Kehutanan sebagai *leading sector*.

Penerima manfaat dari pilihan alternatif tersebut adalah seluruh *stakeholders* dalam rantai nilai kakao termasuk pemerintah dan masyarakat di Donggala. Tetapi Pemda juga bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan dari alternatif kedua ini termasuk beban biaya yang harus ditanggung. Namun demikian, bila dilihat dari eksternalitas positif yang dihasilkan dapat berupa:

- 1.) Peningkatan produktivitas kakao
- 2.) Peningkatan PDRB Kab. Donggala
- 3.) Pendapatan masyarakat terutama petani meningkat sehingga daya beli juga semakin meningkat
- 4.) Peningkatan pendapatan masyarakat berdampak pada pembayaran pajak yang dapat meningkat yang merupakan sumber pendapatan asli daerah

VI. Strategi Implementasi

Berikut adalah rincian strategi implementasi sebagai upaya peningkatan produktivitas kakao. Berdasarkan pemilihan alternatif tindakan berupa regulasi dan non-regulasi, berikut adalah rincian strategi implementasi yang dimaksud:

Non Regulasi

1. **Perancangan *Masterplan* Program Terpadu Pengembangan Kakao 2016-2020.**

| No. | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|
| 1 | Rapat Koordinasi bersama SKPD terkait dan <i>Stakeholders</i> | Bappeda Kab. Donggala |
| 2. | Penyusunan Masterplan dengan mengundang Tim RIA dengan program-program berikut ini: 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Saran dan Prasarana Perkebunan Kakao | Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Donggala |

| No. | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|
| 2 | 2. Program Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao secara Berkelanjutan (<i>Good Agriculture Practice</i>) 3. Meningkatkan Kapasitas dan Jumlah Penyuluh yang berkompeten di Bidang Kakao 4. Fasilitasi Akses Modal 5. Memperkuat Kelembagaan Petani 6. Memaksimalkan Peran dan Fungsi Forum Komunikasi Kakao | |
| 3 | Penyusunan anggaran pelaksanaan <i>Masterplan</i> Program Terpadu Pengembangan Kakao | Bappeda dan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Donggala |
| 4 | Sosialisasi hasil <i>Masterplan</i> Program Terpadu Pengembangan Kakao kepada <i>stakeholders</i> rantai nilai kakao Donggala | Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Donggala |

Regulasi

2. Penerbitan SK Bupati tentang Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao 2016-2020.

| No. | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|-----|--|----------------------------|
| 1 | Rapat Koordinasi bersama SKPD terkait dan Tim RIA | Bappeda Kab. Donggala |
| 2. | Rapat Koordinasi bersama <i>stakeholders</i> rantai nilai kakao | Bappeda Kab. Donggala |
| 3. | Pengajuan draf SK Bupati kepada Bupati | Bagian Hukum Kab. Donggala |
| 4. | Sosialisasi SK Bupati tentang Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao 2016-2020 kepada <i>stakeholders</i> rantai nilai kakao Donggala | Bagian Hukum Kab. Donggala |

Non Regulasi

3. Menyusun rencana kerja Tim Implementasi Program Terpadu Pengembangan Kakao 2016-2020.

| No. | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|
| 1. | Menyusun rencana sosialisasi SK Bupati dan Masterplan program peningkatan produktivitas kakao kepada masyarakat di Kab. Donggala | Bappeda Kab. Donggala |
| 2. | Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk implementasi SK Bupati dan Masterplan program peningkatan produktivitas kakao, berikut adalah rincian aktivitas dalam program masterplan: | Dinas Kehutanan dan Perkebunan, BP4K, Forka Kakao Provinsi Sulawesi Tengah Kab. Donggala |

| No. | Kegiatan | Penanggung Jawab |
|-----|--|--|
| 2. | <p>Dinas Kehutanan dan Perkebunan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Identifikasi hama dan penyakit dan lokasi yang terserang 2) Penyiapan pestisida dan alat pendukung yang sesuai dengan hama dan penyakit tanaman kakao 3) Memberikan penyuluhan dan pelatihan pemberantasan hama kakao serta pengelolaan budidaya 4) Memberikan penyuluhan pembuatan pupuk organik untuk tanama kakao 5) Penyediaan bibit kakao yang sesuai dengan keadaan Donggala 6) Bantuan penyediaan saprodi bagi kelompok tani kakao 7) Melakukan kegiatan peremajaan bagi tanaman kakao yang sudah berumur >25 thn, dan hasil <500kg /ha/tahun 8) Melakukan kegiatan rehabilitas bagi tanaman kakao yang sudah berumur >15 thn, dan hasil <500kg/ha/tahun 9) Melakukan kegiatan intensifikasi bagi tanaman kakao yang sudah berumur >5 thn, dan sering terkena hama dan penyakit 10) Memfasilitasi sertifikasi lahan 11) Sosialisasi akses memperoleh modal dengan kerjasama perbankan dan lembaga pembiayaan lain 12) Optimalisasi koperasi di tingkat Gapoktan 13) Pemerintah memfasilitasi kerjasama kemitraan antara petani dengan lembaga swasta 14) Menyederhanakan syarat dan prosedur memperoleh modal <p>BP4K</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penambahan tenaga penyuluh 2) Memaksimalkan pendampingan penyuluh 3) Pemerintah mengalokasikan anggaran secara proporsional dan berkelanjutan pada perkebunan kakao 4) Pelatihan peningkatan kapasitas penyuluh 5) Melegalisasi kelompok tani 6) Pelatihan manajemen kelompok tani <p>Forka Kakao Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Forka memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh stakeholder terkait kakao | |
| 3. | Pelaksanaan sosialisasi aktivitas kegiatan berdasarkan program terpadu peningkatan produktivitas kakao | Bappeda dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan |
| 4. | Penerapan insentif bagi para pihak yang terlibat dengan program dan disinsentif bagi para pihak yang tidak terlibat dengan program | Bappeda dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan |

VII. Konsultasi Stakeholder

Konsultasi publik dilakukan melalui studi penelitian kepada berbagai pihak terkait yang merupakan *stakeholders* kakao yang terkait langsung dengan kegiatan usaha pada setiap rantai nilai kakao di Kabupaten Donggala: petani, pengepul tingkat desa/kecamatan, pengepul besar, penyedia sarana produksi, penyuluh, serta Pejabat Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Donggala, narasumber dari perguruan tinggi, dan pejabat SKPD terkait.

Konsultasi publik dilakukan dalam beberapa format, yakni :

- 1) Observasi berupa pengamatan langsung terhadap latar dan objek penelitian.
- 2) Wawancara mendalam (Indepth Interview) kepada narasumber terpilih atau para *stakeholders* usaha kakao di Kabupaten Donggala.

- 3) *Focus Group Discussion* (FGD) dengan *stakeholders* kakao di Kabupaten Donggala.

Selain itu, dilakukan juga konsultasi publik pada tahapan proses RIA yang melibatkan tim yang terdiri dari Bappeda, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Bagian Hukum, BP4K, BPPTPM, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kesehatan Hewan, Askindo, Dinas Koperasi dan UKM, Serta Forka Kakao Sulteng. Tabel di bawah ini memaparkan kerangka metode rencana yang digunakan untuk konsultasi publik yang sudah dan akan dilakukan dalam berbagai tahapan proses pembuatan kebijakan. Yang perlu dicatat bahwa perencanaan konsultasi publik ini harus dianggap sebagai dokumen yang fleksibel yang dapat dirubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan.

Tabel 10. Metode Konsultasi Publik

| METODE KONSULTASI PUBLIK | |
|--|--|
| 1) Identifikasi pihak mana sajakah yang relevan untuk dilakukan konsultasi | |
| a) Pihak mana saja yang memiliki pengaruh lebih besar atas kebijakan yang disusun | <ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati dan Wakil Bupati 2. DPRD 3. Bappeda 4. BP4K 5. Distanbun |
| b) Pihak mana saja yang memiliki pengetahuan yang luas atas permasalahan yang sedang dibahas | <ol style="list-style-type: none"> 1. Petani/Kelompok Tani 2. Askindo 3. Bappeda 4. BP4K 5. Distanbun |
| 2) Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsultasi publik | <ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dengan stakeholders yang terlibat dalam rantai nilai kakao, pengamat ahli dan masyarakat umum. Pertemuan tersebut dilakukan dalam berbagai bentuk seperti: pertemuan kecil informal, formal (FGD) dan pertemuan besar seperti seminar. • Publikasi draft RIAS dengan meminta pembaca untuk memberikan masukan. • Publikasi draft kebijakan dengan meminta pembaca untuk memberikan masukan terhadap draf tersebut. |

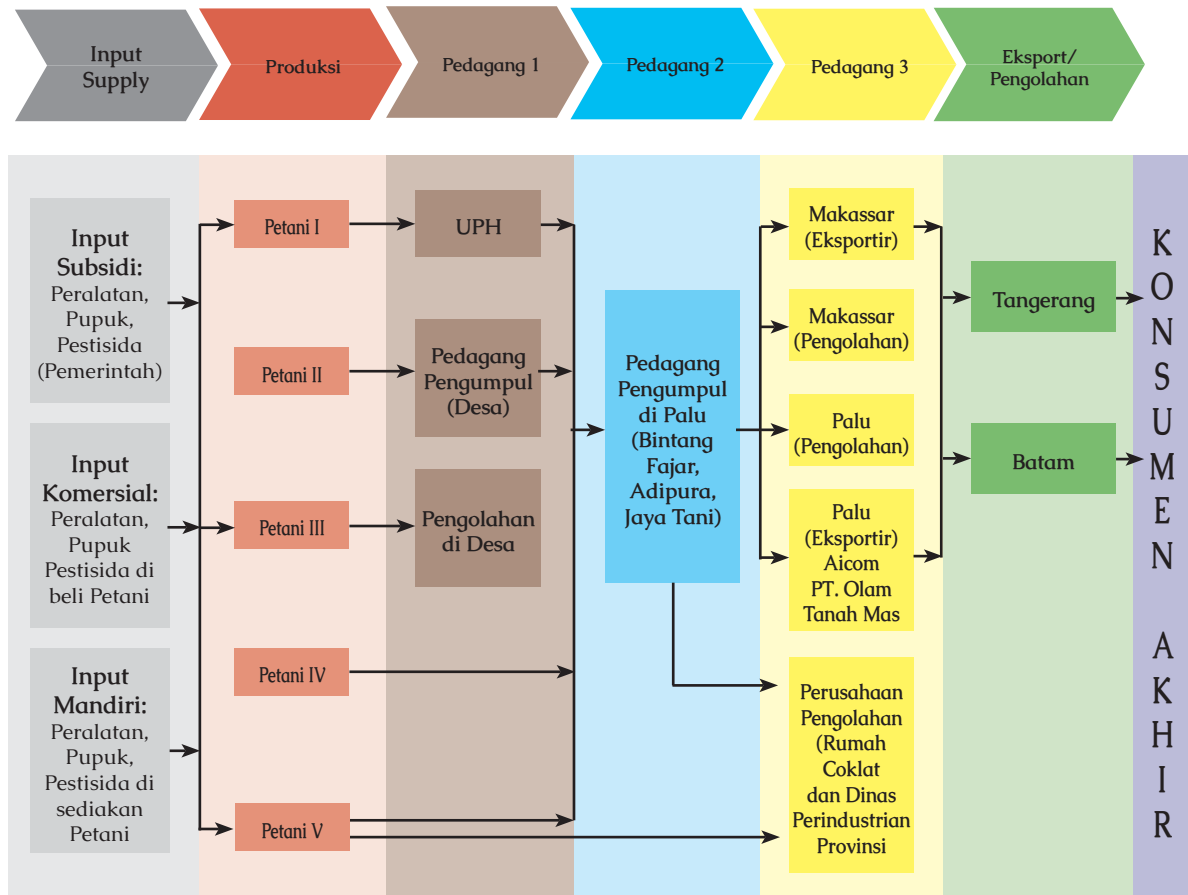
METODE KONSULTASI PUBLIK

| | |
|--|--|
| 2) Bagaimana mekanisme yang tepat dalam menyelenggarakan konsultasi publik | <ul style="list-style-type: none"> • Publikasi draft RIA yang relevan di internet dengan meminta pembaca untuk memberikan komentar melalui email. |
| 3) Bagaimana penggunaan atas hasil konsultasi publik | |
| a) Apakah ada publikasi atas hasil konsultasi publik | Publikasi dibuat dalam bentuk laporan “RIA Statement” dan laporan penelitian draf kebijakan baik berupa hardcopy yang dipublikasikan melalui media cetak, disebarkan dalam diskusi publik baik secara langsung, maupun dalam bentuk softcopy yang disebarkan pada media elektronik di daerah (internet/website Pemda). |
| b) Apakah hasil konsultasi publik dapat merubah isi regulasi atau permasalahan yang sedang dibahas | Ditempatkan sebagai dokumen yang fleksibel yang selalu dapat dirubah sesuai dengan perkembangan informasi yang diperoleh dari partisipan. |

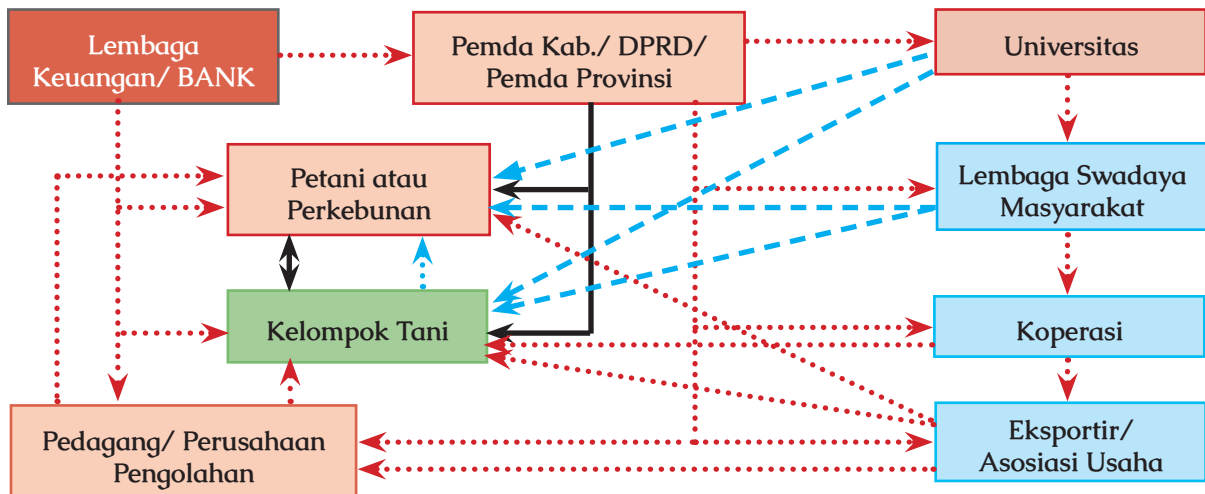


VIII. Lampiran

Lampiran 1. Peta Rantai Nilai Kakao di Kabupaten Donggala



Lampiran 2. Stakeholder Usaha Kakao di Kabupaten Donggala





Lampiran 3. Matriks Permasalahan dan Rencana Tindak Lanjut Pengembangan Rantai Nilai Kakao Di Kabupaten Donggala

| Fakta Objektif | Sumber Masalah | Akar Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Pihak yang Bertanggung jawab |
|--|--|---|---|--|
| Sarana Produksi | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Keterbatasan bibit lokal yang cocok dengan tipologi tanah dan iklim di Donggala Kelangkaan pupuk yang khusus untuk perkebunan | <ul style="list-style-type: none"> Bibit S1 dan S2 belum banyak diproduksi. Penyaluran pupuk khusus kakao membutuhkan proses yang lama untuk verifikasi kesamaan jenis dan jika tidak ada bantuan pupuk khusus biasanya menggunakan pupuk bersubsidi dari Dinas Pertanian. Petani hanya dapat membeli pupuk sesuai dengan kemampuan, bukan sesuai dengan standar kebutuhan tanaman. | <ul style="list-style-type: none"> Program pemerintah seperti gernas tidak tepat sasaran, bibit tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Kondisi perekonomian petani, yang tidak memadai dan minimnya pengetahuan mengelola ekonomi rumah tangga. Budaya masyarakat petani yang belum mengutamakan belanja produktif. | <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan bibit kakao asli Sulteng (S1 dan S2) melalui kerjasama dengan Litbang dan Puslitkoka. Penetapan harga eceran tingkat kabupaten untuk pupuk bersubsidi. Mengadakan pelatihan keuangan bagi petani untuk mengatur rencana alokasi keuangan. Pembuatan dan penggunaan pupuk organik Optimalisasi koperasi ditingkat gapoktan | <ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Donggala Dinas Pertanian Kab. Donggala BP4K Kab. Donggala Gapoktan Perbankan Asosiasi Pengusaha Akademisi Universitas Tadulako |
| Budidaya/Usaha Perkebunan | | | | |
| Produksi: <ul style="list-style-type: none"> Produktivitas kakao rendah: menurunnya kualitas dan kuantitas produksi kakao sebesar 1.600-1700 (kg) | <ul style="list-style-type: none"> Hama penyakit yang menyerang buah kakao (PSD dan PBK) Kurangnya kesadaran petani untuk merawat kebun dengan baik | <ul style="list-style-type: none"> Serangan Hama PBK dan penyakit VSD Pemeliharaan kebun yang tidak rutin Rendahnya pengetahuan petani | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasi Good Agriculture Practice (GAP). | <ul style="list-style-type: none"> BP4K Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Penyuluh Kab. Donggala (BP4K) Gapoktan |

| Fakta Objektif | Sumber Masalah | Akar Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--|---|---|--|
| Budidaya/Usaha Perkebunan | | | | |
| Produksi: <ul style="list-style-type: none"> Mutu kakao rendah | <ul style="list-style-type: none"> Petani tidak dapat fokus dalam merawat kebun, karena memiliki lebih dari satu mata pencaharian Keengganan petani untuk saling berkomunikasi dengan anggota gapoktan untuk mengantisipasi penyebaran hama. | <ul style="list-style-type: none"> Minimnya dampingan penyuluh | <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan pendampingan secara intensif oleh PPL Penguatan pengetahuan PPL khusus untuk membudidayakan kakao. | <ul style="list-style-type: none"> Kelompok Petani Kakao LSM Koperasi Gapoktan |
| Kelembagaan: <ul style="list-style-type: none"> Fokus kelompok petani tidak hanya membudidayakan kakao, tetapi juga termasuk pertanian, perikanan dan peternakan. Kelompok petani yang tidak terlalu aktif hanya berperan sebagai suplier pupuk atau sebagai koperasi simpan pinjam, tanpa ada proses <i>sharing knowledge</i> tentang budidaya kakao. | <ul style="list-style-type: none"> Tumpang tindihnya fungsi dan tujuan kelompok petani, tidak hanya membudidayakan kakao, tetapi sebagai legitimasi untuk para petani mendapatkan subsidi pupuk dari Dinas Pertanian. Budaya dari petani yang enggan untuk aktif dan bertanya jika ada masalah terkait budidaya kakao. | <ul style="list-style-type: none"> Belum ada lembaga yang memfasilitasi komunikasi stakeholder. Belum maksimalnya penguatan dan pembinaan kelembagaan petani. | <ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan pelatihan kelompok petani agar terdorong menjadi kelompok petani utama. Penguatan kelompok petani melalui fasilitas dan permodalan sehingga ada keterikatan dan dapat melakukan pembelian biji kakao basah untuk dikeringkan dan fermentasi bersama. | <ul style="list-style-type: none"> Kelompok Petani Kakao UPH Penyuluh Kab. Donggala (BP4K) LSM |

| Fakta Objektif | Sumber Masalah | Akar Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|--|--|--|---|
| <p>Kelembagaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kelompok tani kurang mengakomodir para petani untuk dapat mengikuti Sekolah Lapang (SL) dan magang di Pusat Studi Kakao dan Kopi. | <ul style="list-style-type: none"> • Lokasi anggota kelompok tani yang jauh, membuat petani juga sulit untuk dapat mengikuti pertemuan kelompok secara rutin | <ul style="list-style-type: none"> • Minimnya dampingan penyuluh | <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan pendampingan secara intensif oleh PPL • Penguatan pengetahuan PPL khusus untuk membudidayakan kakao. | |
| <p>Sumber daya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan dan keterampilan petani masih terbatas. • Keterbatasan kapasitas dan jumlah tenaga penyuluh (PPL) yang mengetahui informasi budidaya kakao di tingkat kabupaten. • PPL kakao yang potensial juga berprofesi sebagai petani kakao dan menjadi inspirasi para petani untuk tetap bertani dan membudidayakan kakao. | <ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya pengetahuan penyuluh dan Sifat Petani yang cenderung enggan dan tidak cepat dalam menerima inovasi yang datangnya dari luar. • Penentuan kadar air untuk penentuan harga biji kakao tanpa menggunakan alat standar. • Ketergantungan yang tinggi pada bantuan pemerintah | <ul style="list-style-type: none"> • Organisasi dan manfaat kelompok belum dipahami • program-program pendampingan petani dan penyuluh tidak berkelanjutan • Rendahnya pengetahuan petani • Minimnya dampingan penyuluh • Petani kurang memiliki pengetahuan pengelolaan keuangan | <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengetahuan petani atas standar biji kakao yang dibutuhkan pabrikan dan yang sesuai standar nasional. • Melakukan pembinaan secara intensif kepada petani untuk mengimplementasi Good Agriculture Practice (GAP). • Peningkatan pengetahuan petani melalui sekolah lapang dan pendampingan secara intensif oleh PPL | <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah • Pemda (Dishutbun, Distan, BP4K) • Gapoktan • Perbankan • Koperasi Gapoktan • LSM |

| Fakta Objektif | Sumber Masalah | Akar Masalah | Rencana Tindak Lanjut | Pihak yang Bertanggung jawab |
|---|----------------|--------------|---|------------------------------|
| <p>Sumber daya manusia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program provinsi yang mengugaskan tenaga ahli sebagai TKP/ petugas lapangan (PL) yang berfungsi untuk melakukan koordinasi dengan tim teknis kabupaten dan menjaring petani dan lahan potensial (Calon Petani dan Calon Lahan) untuk mengembangkan budidaya kakao. • Menurunnya keinginan petani untuk tetap melakukan budidaya kakao. • Pengaruh dari pengijon kepada petani kakao cukup kuat. Pengijon mempengaruhi petani kakao untuk melakukan pengalihan lahan ke sawit | | | <ul style="list-style-type: none"> • Optimalisasi peran master training dan petani andalan untuk difungsikan dalam melakukan diiklat kepada petani lainnya. • Penguatan dan pelatihan kelompok tani agar terdorong menjadi kelompok tani utama. • Menambahkan kuantitas PPL di desa • Bekerjasama dengan PPL provinsi untuk saling berbagi informasi tentang budidaya kakao. • Bekerjasama dengan lembaga keuangan untuk memberikan modal kepada petani • Mengubah strategi PPL dengan memberikan diskusi tematik tentang budidaya kakao untuk petani. • Memperkuat koperasi di tingkat gapoktan | |

Lampiran 4. Matriks Analisis Stakeholders Pengembangan Kakao di Kabupaten Donggala

| PIHAK YANG TERLIBAT | PERAN SAAT INI | PERAN YANG DIHARAPKAN |
|---|---|---|
| Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulteng | <ul style="list-style-type: none"> Mengelola program kakao berkelanjutan (intensifikasi kepada kelompok tani binaan) di 12 wilayah Kab. Donggala Memberikan bantuan persediaan saprodi, terutama pupuk yang khusus untuk tanaman kakao Memberikan tugas pendamping profesional lapangan khusus dalam keahlian membudidayakan kakao kepada poktan | <ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan Pemda Kab. Donggala untuk mereplikasi program Kelompok Tani Binaan ke seluruh petani kakao di Donggala. Bekerjasama dengan pihak akademisi untuk dapat membuat pupuk secara mandiri sehingga dapat memangkas dengan pengujian pupuk. Perlu kemitraan dengan perusahaan yang terlibat langsung dalam pembinaan kelompok petani di lapangan. |
| Dinas Pertanian Kab. Donggala | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengawasan distribusi pupuk bersubsidi mulai dari produksi, distributor hingga sampai kepada pengecer Memastikan kualitas pupuk yang diberikan kepada para petani | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan pengecekan secara berkala terhadap distribusi pupuk bersubsidi agar tidak terjadi kelangkaan Kerjasama dengan Balai Penelitian Tanaman Rempah dalam Pemuliaan Tanaman Kakao Lokal yang unggul (ada kecederungan tahan hama dibanding bibit dari Jember) |
| Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kab. Donggala | <ul style="list-style-type: none"> Memfasilitasi penguatan pengetahuan para petani tentang budidaya kakao Memfasilitasi penguatan kelembagaan kelompok tani Membuat program magang untuk para petani kakao | <ul style="list-style-type: none"> Membuat program untuk pengembangan budidaya kakao Menemukan solusi atas masalah hama yang sering menyerang tanaman kakao Berkoordinasi dengan BP4K dan SKPD lainnya dalam pengembangan program Memberikan penguatan kepada penyuluh terkait budidaya kakao |
| Badan Penyuluh dan Ketahanan Pangan Kab. Donggala | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan penguatan kapasitas terhadap para penyuluh Menyusun rencana program / rencana kerja terkait dengan pengembangan penyuluh, petani, informasi dan juga penggunaan teknologi | <ul style="list-style-type: none"> Berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan terkait temuan dan masalah yang terjadi di lapangan Melakukan pemetaan pengetahuan penyuluh terhadap wilayah kerja Pelatihan dan peningkatan kapasitas penyuluh |

| PIHAK YANG TERLIBAT | PERAN SAAT INI | PERAN YANG DIHARAPKAN |
|--|---|---|
| Kelompok Petani | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan kegiatan budidaya dan pasca panen Merencanakan untuk berpindah komoditas dari kakao ke kelapa atau cengkeh Mengelola simpan pinjam dan koperasi untuk anggota kelompok tani Mulai mengembangkan usaha di bidang peternakan Menyediakan pupuk untuk petani | <ul style="list-style-type: none"> Petani dapat fokus untuk pengembangan budi daya kakao Petani memiliki cukup modal untuk melakukan perawatan dan pembelian saprodi Kapasitas dan pengetahuan petani meningkat sehingga termotivasi untuk merawat kebunnya Petani memiliki sarana untuk berbagi informasi tentang budidaya kakao |
| Pedagang di tingkat desa | <ul style="list-style-type: none"> Pedagang di tingkat desa menerapkan sistem hutang terikat terhadap petani kakao Melakukan pengeringan biji kakao Menampung hasil kakao dari petani/ anggota poktan dengan harga Rp. 30.000 – Rp 35.000 per kg Menjual biji kakao kepada pedagang besar/ eksportir | <ul style="list-style-type: none"> Menghentikan praktek sistem hutang terikat Penerapan sistem pengecekan kualitas biji kakao yang menggunakan alat standar. Membeli kakao fermentasi dengan harga yang sesuai |
| Unit Pengelolaan Hasil (UPH) Kelompok Tani | <ul style="list-style-type: none"> Menampung hasil kakao dari petani/ anggota poktan dengan harga Rp 28.000-Rp 30.000/ kg Melakukan pengeringan biji kakao secara manual karena produksi kakao tidak dalam jumlah besar Menjual biji kakao kepada pedagang besar/ eksportir | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan pendidikan kepada petani tentang kualitas kakao yang baik untuk dijual |
| Badan Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Menulis laporan untuk kegiatan latihan, kunjungan dan supervise Membuat RDKK Memfasilitasi kelompok tani untuk memperkuat kelembagaan petani Memfasilitasi permasalahan petani terkait budidaya pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan | <ul style="list-style-type: none"> Memberikan tenaga penyuluh yang terfokus pada pengembangan budidaya kakao Memberikan pendampingan secara intensif, dengan menambahkan jumlah tenaga penyuluh untuk tiap desa |



| PIHAK YANG TERLIBAT | PERAN SAAT INI | PERAN YANG DIHARAPKAN |
|--|---|---|
| Badan Penyuluh Pertanian tingkat Kecamatan | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dengan BP4K dan juga dinas terkait Focus kegiatan penyuluh untuk program UP-SUS (Upaya Khusus Peningkatan Ketahanan Pangan). | |
| Toko Karya Mukti | <ul style="list-style-type: none"> Mensuplay pupuk dan alat pertanian --> namun mengalami kendala terkait dengan kelangkaan pupuk | <ul style="list-style-type: none"> Pemda dapat melakukan monitoring distribusi pupuk ke pengecer agar tidak sampai terjadi kelangkaan |
| Akademisi | <ul style="list-style-type: none"> Melakukan penelitian terkait budidaya dan agribisnis usaha kakao Membantu Pemerintah Provinsi untuk membuat roadmap budidaya kakao di Sulawesi Tengah. | <ul style="list-style-type: none"> Pemda diharapkan dapat memberikan dana untuk akademisi melakukan riset khusus untuk program pengembangan budidaya kakao Melaporkan hasil riset dan temuan masalah di lapangan kepada pemda untuk dapat ditindaklanjuti Membuat petunjuk atau manual replikasi cerita sukses dalam pengembangan budidaya kakao |
| Koperasi Gapoktan | <ul style="list-style-type: none"> Mengelola simpan pinjam Menyediakan pupuk Membeli ternak Menyediakan bibit | <ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan keanggotaan koperasi |
| Asosiasi Perusahaan | <ul style="list-style-type: none"> Datang secara reguler untuk membeli langsung biji kakao dari petani. mengolahan/memproduksi olahan kakao dan penjualan kakao ke luar negeri | <ul style="list-style-type: none"> Bekerjasama dengan pedagang tingkat desa dan kecamatan guna menerapkan pengolahan biji kakao dengan cara fermentasi termasuk dalam penetapan harga yang layak. Menjalin kemitraan dengan kelompok petani kakao dalam bentuk pembinaan kelompok melalui bantuan saprodi dan pendampingan penerapan teknologi budidaya. |



Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Gd. Permata Kuningan Lt.10, Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan, 12980
Telp.: (021) 83780642/53, Fax.: (021) 83780643, Website: www.kppod.org, Email: kppod@kppod.org, Facebook: [kppod](https://www.facebook.com/kppod)